



Kolaborasi Aktor dalam Program Desa Tangguh Bencana(Destana) di Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka

INFO PENULIS

Muh. Sulfikar
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Indonesia
tasyafikar6@gmail.com

Arafat Mallapiseng
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Indonesia
ArafatMallapiseng@gmail.com

Sudirman Baso
Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Indonesia
SudirmanBaso@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sulfikar, M., Mallapiseng, A., & Baso, S. (2025). Kolaborasi Aktor dalam Program Desa Tangguh Bencana(Destana) di Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),2170-2180.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dinamika kolaborasi aktor dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana), dengan fokus pada hubungan antara BPBD Kabupaten Kolaka dan Pemerintah Desa wulonggere sebagai pelaksana utama di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan BPBD Kolaka, Pemerintah Desa Wulonggere, dan Masyarakat. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kolaborasi aktor dalam pelaksanaan Program Destana antara BPBD Kabupaten Kolaka dan Pemerintah Desa Wulonggere, dapat disimpulkan beberapa poin penting yaitu "Bentuk kolaborasi" yang terbangun antara BPBD dan Pemerintah Desa Wulonggere dibuktikan dengan melakukan sosialisasi program DESTANA yang telah menunjukkan kolaborasi yang cukup efektif, ditandai dengan pembagian peran Pemahaman bersama antar aktor mengenai tujuan dan manfaat Program Destana telah terbentuk pada saat melakukan sosialisasi program DESTANA, Kepercayaan antara BPBD dan Pemerintah Desa meningkat melalui pendekatan partisipatif, pelatihan, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana yang disusun dalam program DESTANA, Dialog antara BPBD dan pihak pemerintah desa telah berlangsung secara terbuka, melalui sosialisasi program DESTANA yang mengajarkan tentang pengurangan risiko bencana, Dampak sementara dari kolaborasi sudah mulai terlihat, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana faktor Tantangan dalam kolaborasi masih ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi yang terbangun antara aktor-aktor lokal dalam program Destana berpotensi kuat dalam membangun ketangguhan masyarakat, asalkan didukung dengan strategi pendampingan berkelanjutan, dialog terbuka, dan penguatan kapasitas lokal secara merata.

Kata kunci: kolaborasi aktor, Program Destana, Pengurangan Risiko Bencana

Abstract

This study aims to analyze the forms and dynamics of actor collaboration in the implementation of the Disaster Resilient Village Program (Destana), focusing on the relationship between the Kolaka Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) and the Wulonggere Village Government as the primary implementers at the local level. This study used a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies with the Kolaka BPBD, the Wulonggere Village Government, and the community. The results of the research that has been conducted regarding the collaboration of actors in the implementation of the Destana Program between the BPBD of Kolaka Regency and the Wulonggere Village Government, can be concluded several important points, namely the "Form of collaboration" that was built between the BPBD and the Wulonggere Village Government is proven by conducting the socialization of the DESTANA program which has shown quite effective collaboration, marked by the division of roles A shared understanding between actors regarding the goals and benefits of the Destana Program has been formed during the socialization of the DESTANA program, Trust between BPBD and the Village Government has increased through a participatory approach, training, and active involvement in disaster preparedness activities compiled in the DESTANA program, Dialogue between BPBD and the village government has taken place openly, through the socialization of the DESTANA program which teaches about disaster risk reduction, Temporary impacts of collaboration have begun to be seen, such as increased public awareness of potential disaster factors Challenges in collaboration still exist, such as limited human resources and budget. This study concludes that the collaboration built between local actors in the Destana program has strong potential in building community resilience, as long as it is supported by a sustainable mentoring strategy, open dialogue, and strengthening local capacity evenly.

Keywords: actor collaboration, Destana Program, Disaster Risk Reduction

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang rawan bencana, membutuhkan pendekatan yang strategis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Salah satu program unggulan yang dirancang untuk mendukung ini adalah Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kolaborasi berbagai aktor, baik dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil. Namun, sejauh ini belum banyak penelitian yang secara mendalam menganalisis bagaimana kolaborasi antar aktor ini terbentuk, atau berlangsung, dan memengaruhi keberhasilan program DESTANA (Desa Tangguh Bencana) (Glagaharjo, 2024).

Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda; pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus; dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kemudian Indonesia juga, sebagai negara kepulauan yang rawan terhadap berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi, menghadapi tantangan besar dalam melindungi masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah kejadian bencana di Indonesia meningkat setiap tahunnya, menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana dalam upaya penanggulangan bencana untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas (Oktari, 2019).

Sejalan dengan yang dijelaskan diatas, bencana telah menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah. Dana yang digunakan untuk tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana juga telah mengurangi anggaran yang seharusnya dapat

dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan program-program pemberantasan kemiskinan. Jika terjadi bencana, masyarakat miskin dan kaum marjinal yang tinggal di kawasan rawan akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena jumlah korban terbesar biasanya berasal dari kelompok masyarakat menengah kebawah ini dan pemiskinan yang ditimbulkan oleh bencana sebagian besar akan menimpa mereka.

Menurut peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPPB) no 1 tahun 2012 yaitu korban terbesar dari bencana adalah kaum miskin di tingkat masyarakat dan yang pertamanya menghadapi bencana adalah masyarakat sendiri, pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan ini adalah melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga sejalan dengan Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana: "Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana".

Termasuk peraturan Nomor 1 Tahun 2012 Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPPB) tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang akan dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana perlu dipadukan ke dalam perencanaan dan praktik pembangunan reguler. Agar pemerintah, terutama di tingkat kabupaten dan kota, dapat melaksanakan program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan memadukannya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, dibutuhkan adanya pedoman umum yang akan menjadi acuan pelaksanaannya.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten kolaka menjalankan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Program ini bertujuan membangun kapasitas masyarakat desa dalam kesiapsiagaan, mitigasi, dan respons terhadap bencana secara mandiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang dinamika kolaborasi aktor dalam program Desa Tangguh Bencana(DESTANA), mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberhasilan program ini di masa mendatang.

Kemudian Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah letak demografinya yang cukup rawan bencana baik bencana tanah longsor, dan juga banjir bandang, karena Sulawesi Tenggara terletak di wilayah pegunungan atau bukit, dan juga cukup banyak Sungai-sungai yang besar, itulah mengapa Sulawesi Tenggara salah satu wilayah rawan bencana, maka dari itu perlu adanya penanganan bencana baik paska bencana maupun sebelum terjadinya bencana.

Namun kita melihat kabupaten kolaka hari ini adalah kabupaten yang langganan bencana, baik bencana banjir, dan juga tanah longsor yang mengakibatkan kerugian bagi Masyarakat yang terkena bencana tersebut, dan peran daripada BPBD kabupaten kolaka dalam mencegah bencana melakukan program yang diperintahkan langsung dari pemerintah pusat, yang telah diatur dalam peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPPB) nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana yaitu, program Desa Tangguh Bencana(DESTANA) yang melibatkan berbagai aktor, baik dari BPBD itu sendiri, pemerintah desa, masyarakat, maupun stakeholder swasta yang tidak terikat.

Hasil dari observasi awal, secara spesifik desa wulonggere, kecamatan polinggona, kabupaten kolaka adalah desa yang rawan bencana banjir, baru-baru ini terjadi pada tanggal 13 maret 2025 yang mengakibatkan masyarakat terhambat beraktifitas, maka dari itu pemerintah desa wulonggere perhatikan melihat hal tersebut. Oleh karena itu, penting untuk diteliti bagaimana kolaborasi antar aktor berlangsung dalam konteks program DESTANA serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mulyati (2024), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Kolaka, Perwakilan pemerintah Desa Wulonggere dan Perwakilan Masyarakat Desa Wulonggere yang terkena bencana yang datanya di ambil dari BPBD Kolaka dan pemerintah Desa Wulonggere. Data yang digunakan yakni menggunakan data

sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Pasal 4 Undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk, antara lain, melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

1. Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
2. Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
4. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategistrategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010-2014 antara lain: penanggulangan bencana berbasis masyarakat; peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah; dan pemanduan program pengurangan risiko ke dalam rencana pembangunan. Selain mengandung keempat aspek yang digariskan di dalam Perda Nomor 3 tahun 2008 di atas, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga mengandung aspek pemaduan prakarsa pengurangan risiko masyarakat ke dalam proses pembangunan daerah.

Tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh bencana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Proses Kolaborasi yang dilakukan oleh kedua instansi ini sangat penting dalam pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA), demi tercapainya keinginan yang diharapkan untuk kesuksesan program tersebut, maka dilaksanakanlah sosialisasi program dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menyikapi sebelum dan sesudah terjadinya bencana, khususnya bencana banjir di desa wulonggere. Berikut penjabaran hasil penelitian dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Dialog antar muka (*face to face dialogue*)

Dialog antar muka sebagai bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dalam kolaborasi, karena adanya proses pembentukan konsesnsus. Komunikasi langsung (*face to face*) merupakan upaya untuk mengurangi streatipe (yaitu persepsi aktor yang memandang adanya sisi buruk actor lain) dan meningkatkan rasa hormat antar actor.

Dalam model kolaborasi ini adalah bentuk kerja sama secara tatap muka untuk melakukan kegiatan dalam hal ini persiapan pembentukan DESTANA, perlunya untuk

melakukan koordinasi yang baik juga dan demi tercapainya tujuan kolaborasi maka dipandang perlu untuk melakukan koordinasi secara terus-menerus dengan aktor desa dan pemerintah dalam hal ini BPBD.

Terkait dengan indikator dialog antar muka maka Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan akan memberikan pernyataan sebagai berikut, bapak SR 56th menyatakan bahwa:

“ketika kita berbicara tentang DESTANA maka kita akan berbicara tentang bencana dan desa, maka dari itu program ini turun langsung ke desa dengan cara dari pihak BPBD melakukan sosialisasi program DESTANA, bertujuan agar desa lebih mandiri dalam penanggulangan bencana, sebelum dan sesudah terjadinya bencana, jadi untuk itu kami dari BPBD kolaka sangat mengharapkan hal itu untuk memandirikan desa dalam penanggulangan bencana, dan tidak lepas dari itu masyarakat harus ikut terlibat secara pro-aktif dalam menjalankan program ini, karena ujung tombak daripada kesuksesan program ini terletak pada masyarakat itu sendiri” (wawancara tanggal 26 maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan strategi penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan aksesibilitas dalam penanggulangan bencana.

Proses collaborative dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana tentu ada hambatan dan peluang yang terjadi selama pelaksanaan. Adapun hambatan yang dirasakan pada saat pelaksanaan Destana seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa Wulonggere Bapak SR 56th menyatakan bahwa

“Selama ini BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kolaka, hanya melakukan kegiatan pelatihan fisik penanganan kedaruratan Bencana dan Evakuasi korban dalam kegiatan sosialisasi, namun tidak diimbangi dengan pelatihan penyusunan persyaratan pembentukan Desa Tangguh Bencana seperti, Kelembagaan, Dasar legalitas, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Forum Pengurangan Resiko Bencana) masih dirasakan sangat kurang atau bahkan tidak pernah dilakukan” (wawancara tanggal 09 mei 2025)

Sejalan dengan yang disampaikan diatas peneliti menyebutkan bahwa masalah waktu menjadi hambatan dalam pelaksanaan Destana, yaitu perencanaan dalam penanggulangan bencana, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala terkait waktu yang tersedia baik dari masyarakat maupun dari pihak BPBD Kabupaten Kolaka.

Adapun informasi mengenai sosialisasi yang diadakan, tidak tersebar ke seluruh masyarakat, yaitu dapat dilihat dari apa yang disampaikan oleh masyarakat yaitu bapak MR 48th, menyebutkan bahwa:

“sosialisasi dihadiri hanya perwakilan dari masyarakat saja dan masyarakat lain yang tidak hadir karna tidak tahu adanya informasi sosialisasi tentang DESTANA, dan pemerintah juga tidak ada tindak lanjut untuk semua masyarakat setelah sosialisasi program DESTANA tersebut” (wawancara tanggal 10 mei 2025).

Kemudian terdapat hambatan lain dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat yang secara sukarelawan ikut serta dalam segala kegiatan menyangkut Destana, kendala untuk masyarakat Desa Wulonggere yaitu terjadi pada saat bencana dan pasca bencana. Hambatan lain yaitu mengenai fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana.

Berdasarkan dari hasil berbagai temuan penelitian tersebut dalam dikatakan bahwa dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di Desa Wulonggere masih banyak berbagai masalah dan hambatan yang terjadi di antara para stakeholders. Hal tersebut yang menyebabkan kurang maksimalnya program Desa Tangguh Bencana dalam membangun masyarakat tangguh. Hambatan dan masalah tersebut dalam dilihat dari kurangnya pelatihan kapasitas, waktu yang disediakan untuk pelaksanaan Destana dari masyarakat, kemampuan fisik, kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam sosialisasi, informasi yang tidak tersampaikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Destana, kurangnya jumlah anggota yang bergabung dalam Tim Destana, terkait dana dan fasilitas sarana dan prasarana.

Kolaborasi dalam Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dilaksanakan karena menjadi tupoksi utama dari BPBD Kolaka dan Agen kebencanaan lainnya dengan terlebih dahulu melakukan survey rawan bencana hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah daerah tersebut rawan bencana hal tersebut menjadi titik pantau dalam kolaborasi program DESTANA.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan informan dari BPBD Kolaka dan Pemerintah Desa, dapat disimpulkan bahwa dialog antarmuka antar pemangku kepentingan memainkan peran penting dalam membangun sinergi dan kesepahaman dalam pelaksanaan Program Destana. Kolaborasi ini menjadi fondasi dalam menyusun perencanaan, membagi

peran dan tanggung jawab, serta menyamakan persepsi terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Meski demikian, efektivitas dialog masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan prioritas antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat desa. Koordinasi lintas sektor sudah mulai terbentuk melalui forum sosialisasi program dan dirangkaikan dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana, namun masih memerlukan penguatan dalam hal struktur komunikasi dan mekanisme tindak lanjut hasil diskusi.

Semua pihak mengakui pentingnya komunikasi terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan program Destana. Diharapkan kedepan ada sistem koordinasi yang lebih formal, seperti pembentukan tim lintas sektor atau sekretariat bersama, agar dialog antarmuka dapat berjalan lebih efektif dan program Destana dapat diimplementasikan secara menyeluruh di tingkat desa.

Hal ini sesuai dengan yang di jelaskan oleh Ashari, et al. (2024) bahwa Koordinasi dan Sinergi. Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan sektor terkait. Koordinasi yang baik dapat menghindari tumpang tindih, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memperkuat dampak positif kebijakan.

2. Membangun kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi intensif (terus menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari munculnya kembali konflik masa lalu.

Indikator membangun kepercayaan bukan hanya nilai normatif, tetapi elemen strategis yang menentukan efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi antara BPBD dan Pemerintah Desa dalam program DESTANA. Tanpa kepercayaan, kolaborasi bisa bersifat formalitas semata. Dengan kepercayaan, kolaborasi bisa menjadi kekuatan nyata dalam membangun desa yang tangguh bencana.

Berikut ini wawancara yang dilakukan kepada Kabid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kolaka Bapak SR 56th menyatakan bahwa:

“Pada proses kolaborasi yang kami lakukan dari pihak BPBD kepada pemerintah desa sangat penting untuk saling memberikan kepercayaan demi kesuksesan mencapai tujuan kolaborasi yang dilakukan, karena tanpa adanya kepercayaan yang diberikan maka tujuan kolaborasi mustahil untuk tercapai, maka dari itu dalam proses kolaborasi terkait dengan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) harus saling menaruh kepercayaan antara BPBD dan juga pemerintah desa agar program berjalan secara efektif dan efisien” (wawancara tanggal 26 maret 2025).

Kemudian kepala desa wulonggere menambahkan pernyataan diatas yaitu, bapak SA 53th mengatakan bahwa:

“setiap program pusat yang dijalankan oleh desa perlu kita saling berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berwewenang di bidang program yang ingin di jalankan, dan tidak lupa juga perlu adanya saling percaya dalam mencapai tujuan program yang efektif, dari semua itu kita tidak luput dari koordinasi atau komunikasi secara baik” (wawancara tanggal 09 mei 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepercayaan antara BPBD Kolaka dan Pemerintah Desa merupakan aspek fundamental yang mendasari keberhasilan kolaborasi dalam Program Destana. Kedua pihak menyadari bahwa membangun ketangguhan desa terhadap bencana tidak cukup hanya dengan perencanaan teknis atau instruksi formal, melainkan juga menuntut adanya hubungan kerja yang dilandasi oleh saling pengertian, rasa hormat, dan kredibilitas antar aktor.

BPBD Kolaka menekankan bahwa kepercayaan dibangun melalui komunikasi yang konsisten, keterbukaan informasi, dan keberpihakan terhadap kebutuhan lokal. Hal ini menciptakan rasa dihargai dan membuat pemerintah desa lebih merasa memiliki program tersebut. BPBD juga mengupayakan kehadiran langsung di desa saat kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan, yang memperkuat ikatan personal dan profesional.

Kemudian dari sisi pemerintah desa, mereka menyampaikan bahwa kepercayaan tumbuh ketika BPBD menunjukkan komitmen nyata dan tidak bersikap top-down. Mereka merasa lebih percaya terhadap BPBD ketika usulan dari desa didengar, diterima, dan ditindaklanjuti. Kepercayaan juga muncul ketika BPBD transparan dalam menjelaskan batas kewenangan dan sumber daya yang dimiliki, sehingga tidak menciptakan ekspektasi yang keliru. Namun, informan juga mencatat bahwa proses membangun kepercayaan masih menghadapi tantangan,

seperti keterbatasan waktu interaksi langsung, rotasi pejabat yang menghambat kesinambungan relasi, serta ketimpangan akses informasi.

Meski demikian, kedua belah pihak sepakat bahwa kepercayaan adalah hasil dari proses jangka panjang yang perlu dipelihara secara berkelanjutan, melalui tindakan nyata, kesediaan mendengarkan, serta adanya ruang dialog yang setara. Membangun kepercayaan bukan hanya tentang memperkuat hubungan institusional, tetapi juga menciptakan ketangguhan sosial sebagai pondasi untuk kesiapsiagaan dan respons bencana yang lebih efektif.

Kesimpulan ini mencerminkan bahwa indikator membangun kepercayaan bukan sekadar pelengkap dalam analisis kolaborasi, tetapi penentu utama dalam menciptakan kerja sama yang tulus dan produktif antara BPBD dan desa. Untuk memperkuat ke depan, diperlukan mekanisme kolaboratif yang lebih terstruktur, pelibatan aktif dari kedua pihak secara berimbang, serta penghargaan terhadap nilai-nilai lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakat desa wulonggere.

Hal ini sesuai dengan yang di jelaskan oleh Ashari, et al. (2024) bahwa Kolaborasi dan Kemitraan. Implementasi kebijakan membutuhkan kerja sama dan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Melibatkan berbagai pihak yang terkait secara aktif dalam proses implementasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan.

3. Komitmen pada proses kolaborasi (*commitment to the process*)

Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. Komitmen dipengaruhi beberapa faktor, yakni (1) *mutual recognition* yaitu berkaitan dengan pengakuan bersama; (2) *join appreciation* yakni apresiasi bersama para aktor; (3) kepercayaan antar aktor; (4) *ownership the process* (rasa memiliki pada proses), hal ini berkaitan dengan pengaruh setiap aktor dalam pengambilan keputusan namun memiliki dilemma, karena adanya kompleksitas dalam kolaborasi; (5) *interdependence* yaitu saling ketergantungan antar aktor. Perbedaan kapasitas yang dimiliki para aktor memunculkan rasa ketergantungan yang dapat menumbuhkan dan memperkuat komitmen.

Komitmen dalam kolaborasi bukan hanya soal niat, tetapi tercermin dari tindakan nyata dan konsistensi peran dalam proses bersama. Dalam konteks Program Destana, keberhasilan membangun desa tangguh sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari BPBD dan Pemerintah Desa untuk terus terlibat, mendukung, dan memperjuangkan keberlanjutan program, meskipun dihadapkan pada keterbatasan atau perubahan situasi.

Selaras dengan yang disampaikan oleh bapak Kabid Perencanaan Dan Kesiapsiagaan yaitu bapak SR 56th Menyatakan bahwa:

“komitmen pada program DESTANA ini kepada pemerintah desa sangat penting karena tanpa adanya komitmen yang jelas, maka program ini hanyalah sebagai formalitas semata tanpa adanya tujuan keberhasilan program, dan komitmen yang kami bangun dari BPBD kepada pemerintah desa yaitu menyukseskan program dengan efisien dan menjadikan desa mandiri dalam menghadapi bencana alam”(wawancara tanggal 26 maret 2025)

Kemudian kepala desa wulonggere menambahkan pernyataan diatas yaitu, bapak SA 58th mengatakan bahwa:

“memang perlu kita saling komitmen agar adanya kepercayaan dalam menjalankan tugas masing-masing, jadi tidak ada kesalahpahaman dalam menjalankan tugasnya oleh karena itu sangat penting kita berkomitmen untuk menyukseskan program tersebut dengan mulus” (wawancara tanggal 9 mei 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa komitmen antara BPBD Kolaka dan Pemerintah Desa dalam menjalankan Program Destana cukup kuat dan nyata di lapangan. Kedua pihak sama-sama menyadari pentingnya peran masing-masing dalam membangun ketangguhan desa terhadap bencana, dan telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan seperti penyusunan rencana kontinjensi, pelatihan relawan, dan pembentukan forum siaga bencana.

BPBD Kolaka menunjukkan komitmennya melalui pendampingan teknis yang berkelanjutan, fasilitasi kegiatan, serta penyediaan materi dan narasumber, meskipun menghadapi keterbatasan personel dan anggaran. Sementara Pemerintah Desa menunjukkan komitmen dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat secara langsung, serta mengintegrasikan program Destana ke dalam perencanaan pembangunan desa.

Namun demikian, informan juga mengakui bahwa tingkat komitmen tidak selalu merata di seluruh desa. Beberapa desa masih memerlukan dorongan dan pendampingan intensif karena keterbatasan kapasitas internal atau kurangnya pemahaman awal tentang urgensi program. Secara umum, indikator komitmen telah terbukti sebagai faktor penting yang mendorong keberhasilan kolaborasi. Komitmen ini tercermin dalam tindakan nyata, kesediaan menjalankan

peran sesuai kesepakatan, serta niat untuk menjaga kesinambungan program di luar kegiatan seremonial atau proyek jangka pendek.

4. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai *common mission* (misi umum), *common pupose* (tujuan umum), *common objectives* (objektivitas umum), dan *shared vision* (visi bersama). Pemahaman yang dimaksudkan adalah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar aktor.

Mengapa Pemahaman Bersama Penting dalam proses kolaborasi Program Destana?

- Menghindari Salah Persepsi: Program Destana memiliki banyak istilah teknis dan pendekatan partisipatif yang dapat menimbulkan kebingungan jika tidak dipahami bersama.
- Meningkatkan Efisiensi Kerja Sama: Jika BPBD dan Pemerintah Desa memahami peran dan mekanisme kerja secara sama, maka kolaborasi menjadi lebih lancar, tidak tumpang tindih, dan minim konflik.
- Membangun Rasa Memiliki: Pemahaman bersama mendorong semua pihak merasa sebagai bagian dari proses, bukan hanya pelaksana instruksi.
- Mendukung Keberlanjutan Program: Ketika semua pemangku kepentingan memahami tujuan program, maka peluang untuk menjaga keberlanjutan setelah proyek selesai akan lebih besar.

Berikut adalah menurut Kasubid Kesiapsiagaan Bapak AA 45th menyatakan bahwa:

“kerja sama yang dilakukan memang perlu yang namanya saling memahami, dalam hal ini pemahaman bersama tentang program yang akan dijalankan baik dari tujuan program maupun proses untuk mencapai keberhasilan program, karena jika tidak ada pemahaman bersama maka proses untuk mencapai keberhasilan program sangat sulit untuk dicapai” (wawancara tanggal 28 maret 2025)

Ditambahkan oleh Sekertaris Desa Wulonggere yaitu Bapak SH 42th menyatakan bahwa:

“sudah benar yang disampaikan dari pihak BPBD, namun partisipasi dari masyarakat juga sangat penting dan harus diberikan pemahaman terkait program dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi banjir, agar masyarakat juga tau cara menyikapi ketika terjadi banjir, maka tidak terjadi kekeliruan ketika memberikan pemahaman”(wawancara tanggal 9 mei 2025).

Pernyataan ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir berkat program Desa Tangguh Bencana(Destana). Partisipasi aktif masyarakat dalam program ini sangat penting untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan desa.

Program Destana bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengenali ancaman di wilayahnya, mengorganisir sumber daya manusia di desa wulonggere, dan meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana. Dengan pelatihan dan sosialisasi yang diberikan, masyarakat Desa Wulonggere kini lebih siap dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana.

Selain itu, pembentukan kelompok tanggap bencana di desa-desa juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kelompok ini terdiri dari warga terlatih yang bertanggung jawab memimpin upaya tanggap dan penyelamatan selama bencana. Mereka juga berperan dalam mengembangkan rencana tanggap darurat dan melatih warga tentang langkah-langkah keselamatan

Hasil observasi dan penelitian menunjukkan bahwa terciptanya pemahaman bersama antara BPBD Kolaka dan Pemerintah Desa menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan Program Destana secara kolaboratif dan terarah. Kedua pihak telah memiliki persepsi yang relatif sejalan mengenai tujuan utama program, yaitu meningkatkan kapasitas desa dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana.

BPBD Kolaka menilai bahwa upaya sosialisasi, pelatihan, dan diskusi partisipatif telah membantu menyamakan pemahaman, terutama dalam hal pentingnya peran masyarakat, konsep pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, dan integrasi program ke dalam rencana pembangunan desa. Pemerintah Desa juga menyampaikan bahwa adanya dialog dalam hal ini sosialisasi program yang terbuka dan bahasa komunikasi yang sederhana dari pihak BPBD sangat membantu dalam memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, pemahaman bersama juga belum sepenuhnya diikuti oleh semua elemen masyarakat, terutama di level relawan baru atau perangkat desa yang belum pernah terlibat sebelumnya.

Secara keseluruhan, indikator “pemahaman bersama” sudah mulai terbentuk dengan baik, namun masih memerlukan penguatan melalui komunikasi yang lebih intensif, penggunaan media pembelajaran yang sesuai konteks lokal, dan forum dialog yang rutin, agar visi kolaboratif Program Destana benar-benar dimiliki dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini sesuai dengan yang di jelaskan oleh Ashari, et al. (2024) bahwa Kapasitas Institusional. Implementasi kebijakan yang sukses membutuhkan kapasitas institusional yang memadai. Lembaga lembaga pelaksana kebijakan harus memiliki sumber daya manusia, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.

5. Dampak sementara (*intermediate outcomes*)

Dampak sementara menghasilkan *feedbacks*. Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut "*small-wins*" (kemenangan kecil). Kemenangan kecil ini akan meningkatkan harapan masing-masing aktor dalam kolaborasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen.

Indikator dampak sementara adalah cermin dari keberhasilan awal sebuah kolaborasi. Dalam konteks Destana, ini menunjukkan bahwa kerja sama antara BPBD dan Pemerintah Desa mulai menghasilkan perubahan positif, meskipun belum sepenuhnya permanen. Jika indikator ini tercapai, maka kolaborasi memiliki landasan kuat untuk dilanjutkan ke tahap pembangunan kapasitas dan ketangguhan jangka panjang.

Berikut adalah tujuan Pengukuran Dampak Sementara:

- Menilai efektivitas awal kolaborasi antara BPBD dan Pemerintah Desa.
- Melihat seberapa jauh program mulai mempengaruhi perilaku, pola pikir, dan struktur lokal.
- Sebagai indikator keberlanjutan, apakah program mulai memberi pengaruh positif yang bisa dilanjutkan dalam jangka panjang.
- Memberikan umpan balik awal untuk perbaikan pelaksanaan program ke depan.

Beberapa risiko Jika Dampak Sementara Tidak Terlihat:

- Munculnya persepsi bahwa program tidak efektif atau hanya bersifat simbolik.
- Penurunan partisipasi dan kepercayaan dari masyarakat atau perangkat desa.
- Sulit untuk mendapatkan dukungan lanjutan dari pihak desa maupun pemerintah daerah.
- Potensi kolaborasi melemah karena tidak ada hasil yang dirasakan dalam waktu dekat.

Indikator dampak sementara penting untuk mengukur hasil nyata dari kolaborasi dalam tahap awal pelaksanaan Program Destana. Jika BPBD dan Pemerintah Desa mampu menunjukkan perubahan-perubahan kecil namun signifikan dalam waktu singkat, maka kepercayaan, partisipasi, dan komitmen akan semakin kuat untuk mendukung keberlanjutan program ke tahap yang lebih besar.

Seperti yang disampaikan oleh Kasubid Perencanaan Bapak ST 45th dalam proses wawancara yaitu:

"Dalam proses kolaborasi atau kerja sama yang kami lakukan, BPBD telah melakukan sosialisasi di desa wulonggere terkait dengan program DESTANA kemudian pemerintah desa memfasilitasi kami dari sisi tempat dan juga forum sosialisasi dalam hal ini menghadirkan masyarakat pada saat kami melakukan sosialisasi "(wawancara tanggal 26 maret 2025).

Kemudian lanjut disampaikan oleh kepala desa wulonggere bapak SA 53th dalam wawancara yaitu :

"Benar yang disampaikan oleh pihak BPBD yang dimana mereka telah melakukan sosialisasi program DESTANA dan memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana terkhusus banjir yang sering terjadi di desa wulonggere ini, dan kami dari pemerintah desa telah melakukan kegiatan seperti pembuatan beronjong dan juga jalur evakuasi ketika terjadinya banjir menggunakan dana desa" (wawancara tanggal 9 mei 2025).

Pernyataan ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir berkat program Desa Tangguh Bencana (Destana). Partisipasi aktif masyarakat dalam program ini sangat penting untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan desa

Berdasarkan hasil wawancara, pada indikator dampak sementara dari kolaborasi antara BPBD Kolaka dan Pemerintah Desa wulonggere mulai terlihat secara nyata, meskipun belum merata di seluruh wilayah dampingan.

Informan dari Pemerintah Desa menilai bahwa kehadiran BPBD secara aktif melalui sosialisasi telah memicu antusiasme dan rasa percaya diri warga, khususnya dalam menghadapi musim hujan atau potensi bencana lokal. Namun demikian, tantangan juga diungkapkan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya keberlanjutan kegiatan setelah pelatihan, serta ketergantungan pada dukungan teknis dari BPBD. Hal ini menunjukkan bahwa dampak sementara yang ada perlu segera diperkuat agar tidak berhenti sebagai hasil sesaat. Secara umum, kolaborasi ini telah menghasilkan dampak awal yang positif, menjadi indikator bahwa pendekatan kolaboratif memberi arah yang benar dalam membangun ketangguhan desa

terhadap bencana. Keberhasilan dampak sementara ini menjadi pijakan penting menuju keberlanjutan dan peningkatan kapasitas yang lebih luas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kolaborasi aktor dalam pelaksanaan Program Destana antara BPBD Kabupaten Kolaka dan Pemerintah Desa Wuloggere, dapat disimpulkan bahwa bentuk kolaborasi yang terbangun antara BPBD dan Pemerintah Desa Wuloggere dibuktikan dengan melakukan sosialisasi program DESTANA yang telah menunjukkan kolaborasi yang cukup efektif, ditandai dengan pembagian peran yang jelas, saling mendukung, dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam pengurangan risiko bencana di tingkat desa, dengan cara membangun beronjong dan juga jalur evakuasi menggunakan anggaran taktis desa wuloggere, kemudian pemahaman bersama antar aktor mengenai tujuan dan manfaat Program Destana telah terbentuk pada saat melakukan sosialisasi program DESTANA.

Dialog antarmuka antara BPBD dan pihak pemerintah desa telah berlangsung secara terbuka, melalui sosialisasi program DESTANA yang mengajarkan tentang pengurangan risiko bencana, dampak sementara dari kolaborasi sudah mulai terlihat, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana. faktor tantangan dalam kolaborasi masih ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi program dan keberlanjutan program. Secara keseluruhan, kolaborasi aktor dalam Program Destana di Desa Wuloggere telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat desa terhadap bencana dalam kegiatan sosialisasi program DESTANA, Untuk memperkuat kolaborasi ini, diperlukan komitmen jangka panjang, penguatan kapasitas masyarakat desa, dan sinergi lintas aktor yang lebih luas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang bersifat membangun dan terarah guna memperkuat kolaborasi aktor dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Kolaka, khususnya di Desa Wuloggere:

Pada tingkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka, perlu adanya pengawasan, pelatihan yang berkala, dan melakukan monitoring di tingkat desa, agar tujuan program DESTANA untuk memandirikan desa dalam penanggulangan bencana dapat terealisasi di desa wuloggere secara efektif.

Ditingkat desa khususnya di desa wuloggere perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelatihan yang berkelanjutan bagi perangkat desa maupun masyarakat, dan perlu adanya pembentukan tim program DESTANA agar pembagian tugas masing-masing aktor lebih jelas.

E. Referensi

- Ashari, S., Arafat, S. P. I., & Risman Togala, M. S (2024). Kebijakan publik: buku ajar. Badan Diklat DIY, 2014. Koordinasi dan Kolaborasi: Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Tingkat IV. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Djumara, Noorsyamsa. 2018. *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.
- Donahue, John D & Richard J. Zeckhauser, 2015. *Collaborative Governance : Private Roles For Public Goals In Turbulent Times*. New jersey, princeton university press.
- Edward M Marshall. 2014. *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*, AMACOM.
- Glagaharjo, D. I. D. (2024). *KOLABORASI AKTOR DALAM PELAKSANAAN DESA TANGGUH BENCANA. 02(04)*.
- Isnanto, I. (2023). Manajemen Program Desa Tangguh Bencana. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 194.
- Mulyati, Ely. Madina, La Ode. Baso, Sudirman. Harahap, Lutfi Henderlan. 2024. *Metode Penelitian*. PT Media Penerbit Indonesia. Meda.
- Oktari, R. S. (2019). Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 4(2), 189.

- Sabaruddin, Abdul & Said, Achmad Lamo. 2020. Collaborative Governance: Pendekatan Pelayanan Publik. CV. Pena Persada. Banyumas Jawa.
- Saraji. (2016). Kajian Empiris Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Terhadap Ketangguhan Masyarakat Pesisir Dalam Menghadapi Bencana Tsunami: Studi Kasus Di Dua Gampong Pesisir Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA)*, 3(4), 142-148.
- Sudarmo. 2019. Elemen-elemen collaborative leadership dan hambatan-hambatan bagi Pencapaian efektivitas collaborative governance.
- Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana
- Peraturan No. 1 Tahun 2012 Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang akan dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana perlu dipadukan ke dalam perencanaan dan praktik pembangunan reguler